

Bab III

Kerjasama Amerika Serikat dan Thailand dalam menangani praktek Perbudakan dan Perdagangan Manusia di Provinsi Songkhla Thailand

3.1 Gambaran Umum Mengenai *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* (DRL) Pemerintah Amerika Serikat

Dalam penanganan kasus perbudakan dan perdagangan manusia di provinsi Songkhla - Thailand, Pemerintah Amerika Serikat memiliki lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap praktek perbudakan dan perdagangan manusia serta hak buruh secara global. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan dalam standar minimum TVPA atau TVPRA yang dikenal dengan lembaga *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* atau DRL.

3.1.2 Gambaran Umum *Bureau of Democracy, Human Rights and Labor* (DRL)



DRL hadir sebagai lembaga yang fokus dalam penanganan Demokrasi, HAM dan Buruh. Lembaga ini memiliki program dalam mempromosikan kebebasan dan demokrasi melindungi HAM serta Buruh di lebih dari 200 negara di dunia (state.gov/). Lembaga ini terbentuk pada tahun 1977 di bawah *U.S Department of State* khususnya di bawah lingkup Wakil Menteri Luar Negeri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Melalui DRL, Amerika Serikat menjalankan program termasuk diplomasi bilateral, keterlibatan multilateral, bantuan asing, pelaporan, penjangkauan publik dan sanksi ekonomi (state.gov/aboutstate/).

Amerika Serikat dalam hal ini berkomitmen untuk bekerja dengan mitra demokratis, organisasi internasional dan regional, organisasi non-pemerintah serta

melibatkan masyarakat internasional dalam mempromosikan demokrasi, melindungi hak asasi manusia dan kebebasan beragama secara internasional serta memajukan hak-hak buruh secara global. Lembaga DRL bertanggung jawab dalam membuat laporan tahunan negara-negara di dunia berkaitan dengan Demokrasi, HAM dan Buruh. Lembaga DRL terbagi menjadi 12 kantor, antara lain:

1. *Office of Country Reports and Asylum Affairs* (Bertugas dalam mempersiapkan laporan tahunan yang dikenal dengan *Country Reports on Human Rights*)
2. *Office of International Religious Freedom* (Bertugas dalam mendukung Duta Besar Amerika Serikat dalam program Kebebasan Beragama Internasional)
3. *Office of Policy Planning and Public Diplomacy* (Bertugas dalam Perencanaan Kebijakan dan Diplomasi Publik)
4. *Office for Africa* (Bertugas dalam memantau HAM di Afrika)
5. *Office for East Asia and the Pacific* (Bertugas untuk memantau HAM di Asia Timur dan Pasifik)
6. *Office for Near East Asia* (Bertugas untuk memantau HAM di negara dekat Asia Timur)
7. *Office for Western Hemisphere* (Bertugas untuk memantau HAM di Amerika Latin)
8. *Office for South Central Asia* (Bertugas untuk memantau HAM di Asia Pusat)
9. *Office of Global Programming* (Bertugas dalam penyusunan program secara global)
10. *Office of Multilateral and Global Affairs* (Bertugas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan Amerika Serikat berkaitan dengan HAM dalam organisasi multilateral, termasuk Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Kantor Komisioner Tinggi untuk HAM, Uni Eropa, Uni Afrika dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

11. *Office of International Labor Affairs (ILA)* (Bertugas dalam lingkup hak buruh secara internasional dengan memberikan saran kebijakan dan inisiatif bersama dengan ILO)

12. *Executive Office* (Kantor Eksekutif)

3.1.3 Misi DRL tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak asasi manusia adalah fondasi fundamental dalam pembentukan Amerika Serikat lebih dari 200 tahun yang lalu. Sejak itu, tujuan utama dari kebijakan luar negeri AS adalah mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Amerika Serikat memahami bahwa keberadaan HAM membantu dalam menciptakan perdamaian, mencegah agresi, meningkatkan supremasi hukum, memerangi kejahatan dan korupsi, memperkuat demokrasi, dan mencegah krisis kemanusiaan.

Karena itu Amerika Serikat berusaha untuk meminta Pemerintah secara global bertanggung jawab atas kewajiban mereka di bawah norma-norma hak asasi manusia universal dan instrumen hak asasi manusia internasional, mempromosikan penghormatan yang lebih besar terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, hak-hak perempuan, hak-hak anak, perlindungan minoritas, mempromosikan aturan hukum, mencari pertanggungjawaban, dan mengubah budaya impunitas; dan mengkoordinasikan kegiatan hak asasi manusia dengan sekutu penting, termasuk Uni Eropa, dan organisasi regional.

DRL menerapkan tiga prinsip utama untuk pekerjaannya dalam hak asasi manusia, yaitu:

Pertama, DRL berusaha untuk mempelajari kebenaran dan menyatakan fakta dalam semua investigasi hak asasi manusia, laporan tentang kondisi negara, pidato dan suara di PBB, dan profil suaka. Setiap tahun, DRL mengembangkan, mengedit, dan menyerahkan kepada Kongres laporan setebal 5.000 halaman tentang kondisi hak asasi manusia di lebih dari 190 negara (state.gov/) yang dihormati secara global

karena objektivitas dan ketepatannya. Kedua, setiap tahun DRL memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam pelatihan militer AS dan program bantuan keamanan; mempromosikan hak-hak perempuan melalui kampanye internasional untuk partisipasi politik dan kesetaraan penuh; melakukan dialog hak asasi manusia tingkat tinggi dengan pemerintah lainnya; mengkoordinasikan kebijakan AS tentang hak asasi manusia dengan sekutu; mengangkat isu-isu kunci dan kasus melalui saluran diplomatik dan publik.

Ketiga, DRL menempa dan mempertahankan kemitraan dengan organisasi, pemerintah, dan lembaga multilateral yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Lembaga ini memanfaatkan forum multilateral untuk memusatkan perhatian internasional pada masalah hak asasi manusia dan mencari koreksi. Setiap tahun, DRL memberikan dukungan teknis, keuangan, atau staff yang signifikan untuk delegasi AS ke pertemuan tahunan beberapa organisasi hak asasi manusia internasional;; memelihara hubungan dengan Komisaris Tinggi PBB tentang Hak Asasi Manusia; dan mendukung terciptanya mekanisme dan lembaga hak asasi manusia multilateral yang efektif untuk akuntabilitas.

3.1.4 Misi DRL tentang Hak Buruh

Berkaitan dengan isu hak buruh, DRL memiliki Kantor Urusan Tenaga Kerja Internasional yang dikenal dengan *Office of International Labor Affairs (ILA)* yang bertugas dalam lingkup hak buruh secara global. ILA membantu melaksanakan agenda Perwakilan Khusus Departemen untuk Urusan Perburuhan Internasional dalam memajukan hak-hak buruh di tempat kerja dalam ekonomi global. Upaya ILA untuk mempromosikan hak-hak pekerja berfokus pada hak buruh yang diakui secara internasional terkait dengan kebebasan berserikat, hak untuk melakukan perundingan bersama, dan penghapusan kerja paksa, pekerja anak, dan diskriminasi. Dalam menjalankan tugasnya, ILA bekerja sama dengan LSM, serikat pekerja, perusahaan, organisasi internasional, dan lembaga federal AS lainnya (state.gov/).

DRL dalam hal ini mensponsori ILA dalam membantu mengoordinasikan dan mendukung hak-hak buruh yang mencakup masalah tenaga kerja sebagai misi Amerika Serikat di seluruh dunia. DRL menyediakan jutaan dolar dalam pendanaan setiap tahun untuk proyek-proyek yang memajukan hak-hak pekerja, membangun kapasitas serikat independen, meningkatkan hak-hak pekerja dalam rantai pasokan, dan mempromosikan dialog di antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah (state.gov/).

3.1.5 Kantor DRL untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik

Salah satu dari 12 kantor DRL yang dikenal dengan *Office for East Asia and the Pacific* merupakan kantor yang bertugas dalam memantau dan membuat laporan tahunan tentang HAM di negara Asia Timur dan Pasifik. Laporan yang dimaksud adalah *The Trafficking in Persons (TIP) Report*. Laporan TIP ini merupakan alat diplomatik utama Pemerintah AS dalam melibatkan pemerintah asing untuk berupaya bersama mengatasi masalah perdagangan manusia secara global. Amerika meyakini bahwa laporan TIP merupakan upaya *anti-trafficking* yang mencerminkan komitmen Pemerintah AS terhadap kepemimpinan global terkait masalah HAM dan penegakan hukum.

Pemerintah AS menggunakan Laporan TIP untuk melibatkan pemerintah asing dalam dialog untuk memajukan reformasi *anti-trafficking* serta memerangi perdagangan manusia dan segala bentuknya untuk menargetkan sumber daya pada program pencegahan, perlindungan, dan penuntutan. Laporan ini digunakan secara global oleh organisasi internasional, pemerintah asing, dan organisasi non-pemerintah sebagai alat dan tujuan utama guna memeriksa sumber daya mana yang paling dibutuhkan, membebaskan korban, mencegah perdagangan, dan membawa pelaku perdagangan ke pengadilan. Dalam pembuatan laporan TIP, pemerintah AS memiliki kantor khusus yang dikenal dengan *The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP)*.

Kantor urusan dalam memantau HAM di Asia Timur dan Pasifik ini dikepalai oleh W. Patrick Murphy. Pejabat Biro Senior ini bertugas dalam menyusun kebijakan luar negeri AS dengan negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik termasuk Thailand. Dalam kasus perdagangan manusia di Industri Perikanan di semua provinsi Thailand termasuk Songkhla, (J/TIP) memiliki andil besar pasca investigasi *Environmental Justice Foundation* (EJF) tahun 2013. Hasil laporan dan investigasi EJF menjadi salah satu acuan (J/TIP) untuk menggolongkan Thailand masuk ke dalam peringkat atau Tier 3.

3. 2 Laporan Investigasi *Environmental Justice Foundation* (EJF) tahun 2013

Dalam laman resmi EJF, Thailand dinilai gagal dalam menangani praktek perdagangan manusia dan segala bentuk prakteknya. Hal ini diungkapkan melalui Eksekutif Direktur EJF – Steve Trent dalam pernyataannya sebagai berikut:

" We were shocked by the extreme levels of violence inflicted on and witnessed by migrant men held as captive workers on these boats and how easy it was for us to conduct this investigation and collect our evidence. This was all out in the open. This is not an isolated case, but indicative of the widespread acceptance and use of modern slavery in an industry that feeds a global appetite for seafood." "We have been genuinely surprised by the levels of collusion by agents of the state, who instead of stopping these awful human rights abuses are ignoring and even benefiting from it."
(Steve Trent, executive director of EJF, 2014)

Sesuai pernyataan Direktur EJF diatas, tim EJF sangat terkejut dengan fakta yang mereka dapatkan di lapangan; yaitu tingkat ekstrim kekerasan yang didapatkan oleh para migran yang dipekerjakan di kapal-kapal. Steve menuturkan betapa mudahnya bagi mereka untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti yang kemudian dirangkum dalam video dokumenter EJF berjudul *Sold to the Sea* pada tahun 2013. Steve juga menambahkan bahwa tim EJF yang melakukan investigasi terkejut dengan tingkat kolusi agen-agen negara di Thailand yang alih-alih menghentikan pelanggaran HAM yang serius ini, justru malah mengabaikan dan bahkan mencari kesempatan untuk mendapatkan untung dari kasus tersebut.

Dalam melakukan investigasi guna mengumpulkan data, EJF terjun ke lapangan dengan mengadakan interview dan survey di 11 provinsi Thailand.

Gambar 1: Cakupan Geografis Survei dan Interview EJF

Figure 1. Geographical coverage



Keterangan: Peta letak 11 provinsi di Thailand (Sumber: EJF)

Selama enam bulan investigasi, EJF mengadakan 434 wawancara di lima zona di 11 provinsi Thailand (lihat peta Figure.1) mencakup zona timur terdiri dari provinsi Rayong, zona tengah: (Provinsi Chonburi dan Samut Sakhon), teluk bagian atas terdiri dari (provinsi Chumporn dan Surat Thani), teluk bagian bawah terdiri dari (provinsi Songkhla dan Pattani) dan teluk Andaman terdiri dari (provinsi Phuket, Ranong, Trang dan Phang Nga). 434 orang yang berhasil diwawancarai notabene berjenis kelamin laki-laki,

Gambar 2: Profil Pekerja Berdasarkan Sektor dan Kewarganegaraan

Table 3. Worker profile, by sector and nationality

Profile	Total n=434 (%)	Fishing n=196 (%)	Seafood n=200 (%)	Aquaculture n=38 (%)	Cambodia n=125 (%)	Myanmar n=287 (%)	Thailand n=22 (%)
Age							
Younger than 18	1	2	1	-	1	2	-
18-24	24	20	27	21	18	28	5
25-34	42	41	40	53	44	40	41
35 or older	33	37	32	26	38	30	55
Working age							
Started work before age 18	33	24	41	39	16	39	59

Berdasarkan keterangan tabel diatas, 434 orang yang berhasil diwawancarai untuk mengumpulkan bukti terdiri dari 125 orang berkewarganegaraan Kamboja, 287 orang berasal dari Myanmar, dan 22 orang sisanya berasal dari Thailand. Kebanyakan dari 434 orang tersebut berusia diatas 24 tahun.

Table 3. Worker profile, by sector and nationality

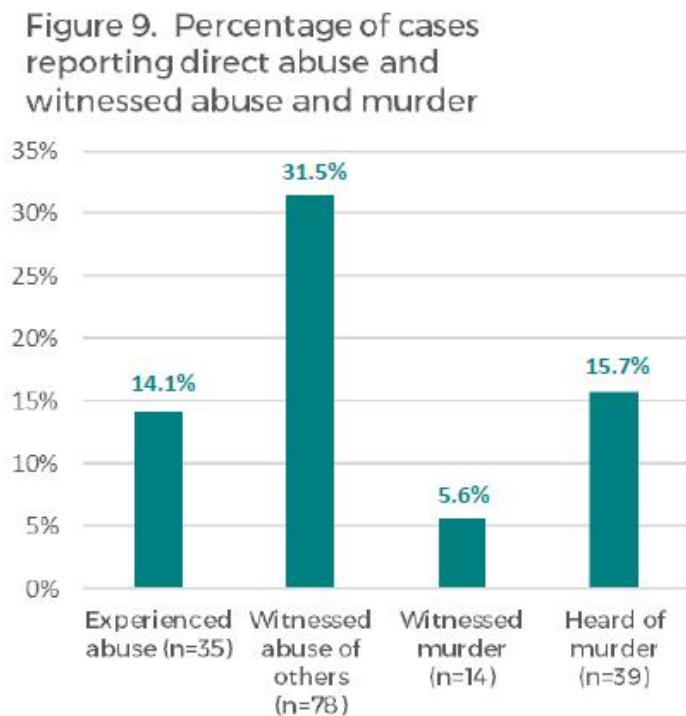
Profile	Total n=434 (%)	Fishing n=196 (%)	Seafood n=200 (%)	Aquaculture n=38 (%)	Cambodia n=125 (%)	Myanmar n=287 (%)	Thailand n=22 (%)
Employed in which sector							
Fishing	45	100	-	-	75	33	27
Seafood	46	-	100	-	22	55	68
Aquaculture	9	-	-	100	3	12	5

When comparing migrant workers from Cambodia and Myanmar, some differences emerged (table 3). More respondents from Cambodia were married and had children. Respondents from Myanmar tended to be younger on average and had somewhat less education.

Berdasarkan data diatas, dari 434 orang yang berhasil diwawancarai 196 orang bekerja di sektor penangkapan ikan, 200 orang bekerja di sektor industri pengolahan seafood

dan 36 sisanya bekerja di sektor akuakultur atau budidaya perairan. Dalam tabel ditambahkan bahwa migran berasal dari Kamboja dan Myanmar memiliki perbedaan, Responden wawancara asal Kamboja kebanyakan telah menikah dan memiliki anak. Sementara responden asal Myanmar kebanyakan lebih muda dan pendidikannya kurang.

Gambar 3: Laporan Kekerasan Terhadap Migran Penangkap Ikan



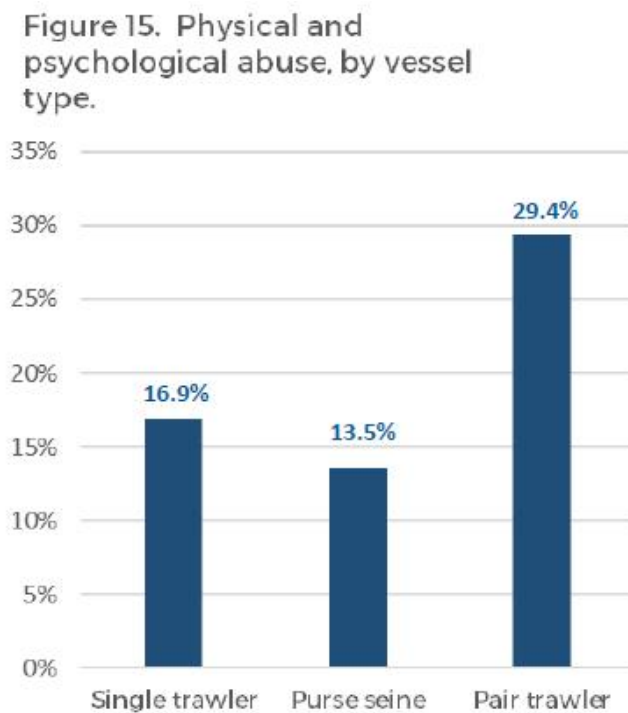
Persentase dari laporan kasus kekerasan, penyaksian kekerasan dan pembunuhan

(Sumber: IJM dan *Issara Institute*, 2014)

Berdasarkan keterangan grafik diatas, 35 dari 166 migran penangkap ikan di kapal mengaku pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kapten maupun awak kapal. 78 mengaku pernah menyaksikan kekerasan terhadap sesama rekan mereka, 14 orang pernah menyaksikan pembunuhan terhadap rekan kerjanya, dan 39 orang lainnya pernah mendengar kasus pembunuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para korban selamat, kekerasan yang mereka peroleh berupa pemukulan oleh kapten maupun pengawas kapal dengan menggunakan beragam senjata seperti

senapan, pisau, tongkat kayu, keranjang ikan, tali besar, ekor ikan pari dan rantai (Issara Institute, 2014:18). Terkait dengan pembunuhan, responden mengaku menyaksikan sendiri rekan kerja mereka dibunuh dengan cara ditembak didepan mereka dan rekan kerja lainnya membawa tubuh tersebut kemudian membuangnya ke laut. (Issara Institute, 2014: 27).

Gambar 4: Kekerasan Terhadap Migran Berdasarkan Tipe Kapal



Kekerasan Fisik dan Psikologi berdasarkan jenis kapalnya

(Sumber: IJM dan *Issara Institute*, 2014)

Data diatas menjelaskan tingkat kekerasan yang diperoleh para penangkap ikan di laut Thailand. Berdasarkan jenis kapalnya. 29.4% dari 166 responden yang menggunakan kapal jenis *Pair Trawler* cenderung mendapatkan kekerasan fisik dan psikologi daripada kapal jenis *single trawler* dan *purse seine*.

Gambar 4. 1 Kapal Jenis *Pair Trawler*



Gambar kapal jenis *Pair Trawler* (Sumber: IJM dan *Issara Institute*, 2014)

Berdasarkan penjelasan laporan EJF dan *Issara Institute*, kapal jenis *Pair Trawler* lebih banyak digunakan dengan pertimbangan biaya bahan bakar, jarak perjalanan dan waktu di laut, serta kualitas tangkapan. Kapal *Pair Trawler* beroperasi dengan memasang jaring di dua kapal dengan jarak terpisah dan bergerak bersama-sama untuk menarik hasil tangkapan.

3.3 Pasca investigasi ‘*Sold to the Sea EJF*’ 2013

Pasca dikeluarkannya video dokumenter ‘*Sold to the Sea*’ oleh *Environmental Justice Foundation* (EJF) tahun 2013, pemerintah Thailand dinilai gagal dalam menangani kasus kejahatan kemanusiaan dibidang perbudakan dan perdagangan manusia. Hasil investigasi ‘*Sold to the Sea*’ yang berhasil menguak bagaimana para migran di industri perikanan Thailand diatas diperjualbelikan dan diperbudak di laut, menuai banyak reaksi dan tekanan internasional.

3.3.2 *Joint NGO Letter* untuk Menlu AS - John F. Kerry

Dalam suratnya kepada John F. Kerry – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, organisasi-organisasi internasional yang fokus dalam penanganan Hak Asasi Manusia meliputi *Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations*, *Anti-Slavery International*, *Environmental Justice Foundation*, *Fairfood International*, *Finnwatch*, *Food Chain Workers Alliance*, *Fortify Rights*, *Humanity United*, *International Labor Rights Forum*, *National Consumers League*, *Slave Free Seas* dan *Walk Free* (antislavery.org) mendesak Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk

mempertahankan Thailand di posisi Tier 3 tingkatan terendah dalam TPVA, sebagai wujud aksi protes mereka pasca dikeluarkannya video dokumenter ‘Sold to the Sea’ oleh EJF.

Selain desakan, organisasi-organisasi internasional tersebut juga mendorong Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mempertimbangkan delapan poin rekomendasi yang perlu ditambahkan dalam laporan *U.S Trafficking In Persons (TIP)*. Langkah ini merupakan wujud upaya mereka dalam mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam penanganan kasus perdagangan manusia, khususnya pemerintah Thailand; guna membuat kemajuan substantif (*antislavery.org*). Adapun delapan poin rekomendasi yang diajukan meliputi:

1. Memperkuat mekanisme pengawasan tenaga kerja dengan memberikan sumber daya penerjemah dan panduan yang diperlukan oleh petugas dan inspektur provinsi di Pusat Koordinasi Penegakan Maritim. Dalam hal ini, penerjemah harus tersedia untuk semua inspeksi dan inspektur harus berusaha berbicara dengan para tenaga kerja diluar situs untuk menghindari retribusi
2. Memperketat pendaftaran kapal nelayan dan memastikan daftar awak yang akurat serta mewajibkan semua kapal diatas 100 GT untuk memiliki nomor IMO (*International Maritime Organization*)
3. Meratifikasi Perjanjian *Port State Measures* serta konvensi ILO nomor 188 mengenai Pekerjaan di bidang Perikanan, nomor 188 mengenai Kebebasan Berserikat dan nomor 98 tentang Penawaran Kolektif
4. Menghentikan semua bentuk intimidasi dan pelecehan terhadap para aktifis HAM termasuk peneliti hak-hak buruh, advokat, jurnalis dan lainnya dalam menyerukan kepatuhan pada kewajiban terhadap hukum internasional Thailand
5. Mengakui semua konvensi inti ILO, termasuk hak atas kebebasan berserikat dan perundingan bersama dalam mengijinkan ruang serius bagi keterlibatan pemberdayaan pekerja, serikat pekerja serta masyarakat sipil

6. Mengizinkan buruh migran untuk mendaftar secara mandiri untuk ijin kerja, mencari pekerjaan, serta mendaftar ulang di pusat tenaga kerja lokal setelah jangka waktu tertentu
7. Mengatur dan mendaftar para perantara tenaga kerja, melarang para pemberi kerja dalam meminta calon buruh untuk membayar sejumlah uang guna mendapatkan pekerjaan.
8. Menciptakan *zero-tolerance atmosphere for corruption*, sebuah gebrakan untuk mewujudkan nol toleransi untuk korupsi diantara polisi perdagangan dan inspektur pelabuhan. Membentuk badan independen dimana pekerja migran dapat melaporkan pelanggaran hak asasi manusia oleh otoritas polisi yang tidak memihak dalam menyelidiki keluhan migran. Mengadili polisi dan pejabat yang melakukan kejahatan terhadap buruh migran atau memfasilitasi perdagangan dalam dokumen kerja palsu (*antislavery.org*)

Langkah-langkah diatas sebagaimana ditekankan oleh organisasi-organisasi internasional tersebut; merupakan solusi yang harus ditempuh Thailand guna memerangi kasus perdagangan manusia. Adapun tembusan surat tersebut ditujukan kepada Thomas E. Perez - Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat, Daniel Russel – Asisten Menlu untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Tom Malinowski – Asisten Menlu untuk Urusan Demokrasi, HAM dan Buruh, Kristie A. Kenney – Duta Besar Amerika Serikat untuk Kerajaan Thailand, Patricia A. Butenis – Pejabat Direktur *Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*.

3.3.3 Tekanan Media Internasional

Selain reaksi dari organisasi-organisasi internasional, media dari berbagai negara turut mengancam kasus perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di industri perikanan Thailand. Dalam laporannya yang berjudul '*Trafficked into Slavery*' tahun 2014, *The Guardian* memberikan komentar dengan menekan negara-negara tujuan ekspor Thailand untuk segera mengambil tindakan yang nyata. Adapun negara tujuan yang dimaksud mencakup ketiga negara ekportir terbesar Thailand yaitu Uni Eropa, Amerika dan Jepang.

The Associated Press juga turut memberikan komentar dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Thailand needs to address this issue head on, by rooting out corruption, prosecuting offending boat owners and companies, and ensuring a rigorous inspection regime. Meanwhile seafood businesses need to urgently investigate their supply chains to ensure that no products linked to human trafficking are present.” (The Associated Press, 2014)

Menurut *The Associated Press*, Thailand perlu mengatasi kasus perdagangan manusia di industri perikanan ini secara langsung dengan membasmi korupsi, menuntut para pemilik kapal serta menyelidiki rantai pasokan makanan laut mereka untuk memastikan tidak ada produk yang terkait dengan perdagangan manusia.

The Associated Press juga menuturkan bahwa hasil laut yang diimpor Amerika dari Thailand umumnya dipasok ke supermarket ternama di Amerika Serikat disebutkan seperti *Wal-Mart, Kroger, Morrisons, Whole Foods, Tesco, Dollar General, Petco*, dan juga beberapa restoran seafood seperti *Red Lobster* dan *Olive Garden* (*The Associated Press*, 2015: 43). Selain *The Guardian* dan *The Associated Press*, media internasional lainnya seperti *CNN, New York Times, The Independent* dan *BBC* ikut menyoroti kondisi kerja yang tidak manusiawi di industri-industri perikanan dan laut Thailand; serta mendesak Amerika untuk mencegah masuknya barang impor di sektor makanan laut dari Thailand.

Hal ini kemudian mendapat respon langsung dari beberapa retailer supermarket terbesar di Amerika Serikat, sebagai berikut:

Tesco: *“We regard slavery as completely unacceptable. We are working with CP Foods to ensure the supply chain is slavery-free, and are also working in partnership with the International Labour Organisation and Ethical Trading Initiative to achieve broader change across the Thai fishing industry.” (Tesco, 10 Juni 2014)*

Walmart: *“We are actively engaged in this issue and playing an important role in bringing together stakeholders to help eradicate human trafficking from Thailand’s seafood export sector.” (Walmart, 2014)*

Morrisons: *“We are concerned by the findings of the investigation. Our ethical trading policy forbids the use of forced labour by suppliers and their suppliers.”* (Morrisons, 2014)

Sebagaimana disebutkan diatas, Tesco, Walmart dan Morrisons menyatakan bahwa mereka telah bekerjasama dengan perusahaan Thailand CP Foods dan ILO untuk memastikan barang yang masuk bebas dari hasil perbudakan. Selain itu, dalam laporan *Associated Press* berjudul ‘*Seafood From Slaves*’, imigran asal Myanmar saat diwawancarai menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Amerika Serikat, dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Basically, we are slaves — and slavery is the only word that I can find - but our condition is worse than slavery. On behalf of all the fishermen here, I request to the congressmen that the United States stop buying all fish from Thailand. This fish, we caught it with our blood and sweat, but we don’t get a single benefit from it.” (Hlaing Min, Myanmar)

Buruh asal Myanmar tersebut meminta Amerika Serikat berhenti membeli hasil laut dari Thailand, karena hasil tangkapan tersebut menurutnya adalah hasil ketidakadilan yang mereka dapatkan.

3.4 Respon dan Kebijakan Amerika Serikat

Menanggapi surat dan tekanan internasional tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2014 memutuskan menempatkan Thailand di peringkat terendah dalam *TIP Report*. Keputusan ini berdasar dan melalui pertimbangan upaya 3P (*prevention, protection, and prosecution*) yang telah dilakukan pemerintah Thailand. Istilah 3P yang dimaksud mencakup upaya pencegahan praktek perdagangan manusia, perlindungan para korban, serta penuntutan para pelaku. Dalam buku hitam *U.S Trafficking in Persons*, dari Tier 2 Watchlist pada tahun 2013, Thailand menduduki posisi Tier 3 tahun 2014 dan 2015. Tier 3 merupakan posisi terendah yang artinya pemerintah gagal dalam menangani kasus perdagangan manusia di negaranya. Keputusan tersebut sesuai dengan data berikut ini:

Gambar 5. Ranking TIP 2014 dan 2015

	2014 RANKING	J/TIP RECOMMENDED RANKING FOR 2015	FINAL 2015 RANKING
China	TIER 2 WATCH LIST	TIER 3	TIER 2 WATCH LIST
Cuba	TIER 3	TIER 3	TIER 2 WATCH LIST
India	TIER 2	TIER 2 WATCH LIST	TIER 2
Malaysia	TIER 3	TIER 3	TIER 2 WATCH LIST
Mexico	TIER 2	TIER 2 WATCH LIST	TIER 2
Thailand	TIER 3	TIER 3	TIER 3
Uzbekistan	TIER 3	TIER 3	TIER 2 WATCH LIST

Note: J/TIP refers to the U.S. Department of State's Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
Sources: Reuters; 2015 Trafficking in Persons Report

Keterangan: data diatas berdasarkan pada laporan *U.S Trafficking in Persons* tahun 2014 dan 2015, berisi daftar beberapa negara yang masuk dalam daftar hitam laporan Amerika Serikat. (Sumber: TIP 2015).

Berdasarkan data keterangan diatas, Cuba, Malaysia dan Uzbekistan pada tahun 2014 menempati posisi Tier 3. Sementara Thailand tetap menempati Tier 3 disebabkan tidak adanya upaya signifikan dalam menangani praktek perdagangan manusia. Dalam hal ini, sanksi bagi negara-negara yang tidak melakukan upaya yang signifikan untuk memerangi perdagangan manusia tetap diberlakukan. Sebagaimana telah diatur dalam TVPRA, Presiden Amerika Serikat menolak memberi bantuan kepada negara-negara yang menduduki Tier 3 dan memastikan akses mencari dana dari Lembaga Keuangan Multilateral seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) akan dipersulit (US Department State, 2014: 36).

3. 4. 1 Metode Pemutusan Tier/ Ranking

Laporan TIP memeringkat negara-negara berdasarkan tingkat kepatuhan mereka terhadap standar minimum, sebagaimana telah didefinisikan dalam TVPRA. Dalam menyusun dan memutuskan peringkat atau Tier suatu negara, DRL mengembangkan metode yang ketat dalam laporan TIP. Terkait proses pengumpulan data, Departemen Luar Negeri AS di Washington meminta informasi dari 186 kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia, termasuk Thailand (*Royal Thai Embassy Washington DC Report*, 2016: 115). Konsulat dan Kedutaan mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait tingkat perdagangan manusia maupun upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di negara-negara tuan rumah mereka.

Laporan Kedutaan dan Konsulat tersebut berdasarkan pada diskusi dengan Pemerintah tuan rumah, Organisasi Non-pemerintah Lokal (LSM), Petugas Imigrasi, Polisi, Wartawan, Korban, Pers, Penegakan Hukum Internasional, UNICEF, UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi, *Human Rights Watch*, Amnesty International, Kantor Penasihat Hukum, Biro Demokrasi Hak Asasi Manusia, dengan bantuan dari komunitas intelijen untuk meninjau laporan dari kedutaan dan konsulat AS. Informasi terkumpul juga berasal dari laporan yang dikirimkan ke tipreport@state.gov (*Royal Thai Embassy Washington DC Report*, 2016: 104). Alamat e-mail ini memungkinkan organisasi dan individu untuk berbagi informasi tentang kemajuan pemerintah dalam menangani perdagangan manusia.

Dari data yang terkumpul, *U.S Department State* kemudian memutuskan peringkat atau tier suatu negara. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, pada tahun 2012 – bersama dengan 20 juta lebih orang di dunia, dibawah kepemimpinan Presiden AS, Barack Obama mengarahkan kabinetnya untuk bekerja dua kali lipat dengan membentuk *President's Integrcy Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons* yaitu program pemantauan komitmen negara-negara untuk memberantas perdagangan manusia.

Menurut Amerika Serikat, ada beberapa aspek yang menyebabkan kegagalan pemerintah Thailand dalam menyelesaikan permasalahan perbudakan dan perdagangan manusia ini di negaranya, antara lain:

a. Korupsi

Korupsi terus melemahkan upaya anti-perdagangan manusia. Dalam laporan US Departemen menyebutkan tetap adanya laporan pejabat pemerintah Thailand yang terlibat dalam kasus ini. Disamping para pekerja migran yang takut melaporkan kejahatan yang mereka terima dan enggan bekerja sama dengan otoritas pelindung di Thailand karena kurangnya kesadaran atas hak-hak mereka. Berdasarkan pernyataan

US Department State, banyaknya laporan-laporan keterlibatan langsung pejabat pemerintah dalam pemerasan para migran, mengambil keuntungan dan terlibat suap. Laporan yang kredibel mengindikasikan beberapa pejabat korup melindungi dan berkolusi dengan para broker.

Gambar 6: Kasus Letnan Jenderal Manas Kongpan



Keterangan: Jenderal Thailand Manas Kongpan (tengah) dinyatakan bersalah dalam Kasus Perdagangan Manusia (Sumber: Kompas Internasional, 2015)

Letnan Jenderal Manas Kongpan merupakan seorang perwira senior militer yang memimpin Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (ISOC) untuk kawasan Thailand Selatan. Manas Kongpan dinyatakan bersalah dengan 13 dakwaan dalam kasus perdagangan manusia. Ia dinyatakan terbukti menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemimpin operasi di wilayah Thailand Selatan mencakup provinsi Narathiwat, provinsi Pattani, Satun, Yala dan provinsi Songkhla. Sidang yang mengungkap hubungan antara perwira korup dan para pedagang manusia pada tahun 2015 menetapkan Manas Kongpan sebagai terdakwa utama karena menerima suap dalam kasus yang melibatkan penyeludupan migran asal Myanmar.

Putusan Hakim di Pengadilan Kriminal Bangkok juga menyatakan bahwa Letnan Jenderal Manas Kongpan bersalah karena memiliki peran penting dalam organisasi kejahatan transnasional dengan bekerjasama dengan orang-orang lain untuk

memfasilitasi perdagangan manusia. Jenderal bintang tiga tersebut berperan besar dalam menentukan jalur perdagangan manusia yang mampu menghindari pos pemeriksaan, seperti dengan cara menembus hutan dan pantai terpencil di Thailand Selatan. Manas disebutkan menerima imbalan mencapai US\$ 440 ribu (sekitar Rp 5,86 miliar). Karena perbuatannya tersebut, Letnan Jenderal Manas Kongpan divonis hukuman penjara selama 27 tahun.

Gambar 7: Kasus Pajjuban Aungkachotephan atau “Ko Tong”



Keterangan: Pajjuban Aungkachotephan (depan) bersama Jenderal Thailand Manas Kongpan (tengah) terdakwa kasus Perdagangan Manusia (Sumber: The Diplomat, 2015)

Pajjuban Aungkachotephan merupakan terpidana politisi, dari Thailand selatan. Patchuban atau lebih dikenal sebagai "Big Brother Tong" merupakan mantan pejabat di pemerintah provinsi Satun dan mantan walikota Padang Besar di provinsi Songkhla – Ia dijatuhi hukuman 75 tahun penjara. Menurut penuturan polisi, Pajjuban mendapatkan keuntungan dari pemerintah lainnya dengan memanfaatkan pulau pribadinya di Laut Andaman sebagai tempat transit para korban perdagangan manusia selama bertahun-tahun. Hakim di Pengadilan Kriminal Bangkok tahun 2015 menyatakan bersalah 102 tersangka termasuk seorang tentara dan empat polisi yang terbukti mengabaikan tugas dalam menjaga kamp pencegahan perdagangan manusia. Sekitar 10 orang di antaranya, termasuk seorang kapten dan petinggi kepolisian, telah resmi dipecat dari kesatuan mereka (The Diplomat, 2015).

b. Ketidapatuhan terhadap TVPA

Amerika dalam laporannya menilai Pemerintah Thailand tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum khususnya peraturan dalam *The Trafficking Victims Protection Act* (B.E.2551 / 2008) dalam upaya penghapusan perdagangan manusia. Hal ini didukung setelah dirilisnya video dokumenter yang menggambarkan fakta dilapangan berbanding terbalik dengan komitmen pemerintah Thailand untuk turut membantu mengentaskan permasalahan perdagangan manusia di dunia. Beberapa contoh kasus yang menunjukkan keterlibatan oknum negara di atas dalam mengambil keuntungan dari kasus perdagangan manusia menjadi salah satu bukti nyata ketidakseriusan pemerintah Thailand dalam menjunjung tinggi HAM di negaranya. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan AS dalam laporan U.S TIP tahun 2013 dan 2014.

Hal ini didukung dengan pernyataan AS dalam laporan TIP sebagai berikut:

The Government of Thailand does not fully comply with the minimum standards / The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) for the elimination of trafficking. Overall anti-trafficking law enforcement efforts remained insufficient compared with the size of the problem in Thailand, and corruption at all levels hampered the success of these efforts. There are reports of corrupt officials on both sides of the border who facilitate the smuggling of undocumented migrants between Thailand and neighboring countries including Laos, Burma, and Cambodia; many of these migrants subsequently become trafficking victims. Also, the government did not make sufficient efforts to proactively identify trafficking victims among foreign migrants, who remained at risk of punishment for immigration violations.

Menurut pemerintah AS, usaha yang dilakukan Thailand dalam menangani praktek perdagangan manusia tidak sesuai dengan ukuran masalah yang sebenarnya terjadi disana. Hal ini dikarenakan oleh maraknya kasus korupsi di semua level, khususnya para pejabat korup yang memfasilitasi penyeludupan migran tidak berdokumen asal Laos, Burma dan Kamboja. Hal ini merupakan faktor penghambat utama dalam usaha penanganan masalah tersebut. AS juga menambahkan bahwa pemerintah Thailand tidak menunjukkan usaha signifikan untuk secara proaktif mengidentifikasi para korban perdagangan di antara para migran asing, yang tetap berisiko dihukum karena pelanggaran imigrasi.

3.3 Respon dan Kebijakan Thailand

Menteri Luar Negeri Thailand – Sihasak Phuangketkeow dalam *The Straits Times* pada 21 Juni 2014, menyatakan respon kekecewaan Thailand terhadap keputusan Amerika Serikat. Dalam *TIP Report*, Amerika Serikat menyatakan bahwa upaya penegakan hukum dalam memerangi perdagangan manusia masih belum cukup signifikan, dibandingkan dengan ukuran masalah sebenarnya di Thailand. Selain itu menurut laporan TIP Amerika, korupsi di semua tingkatan masih menghambat keberhasilan upaya-upaya memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand. Respon Thailand terhadap hasil laporan *U.S Trafficking In Persons* disampaikan oleh Sihasak Phuangketkeow.

Menurut Menteri Luar Negeri Thailand tersebut, tidak tepat apabila sebuah negara menggunakan tolak ukurnya sendiri untuk mengevaluasi apa yang negara lain sedang upayakan. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataannya untuk *The Straits Times* - sebuah media Singapura pada Juni 2014, yang menyatakan bahwa:

" It is a very great disappointment for us and we disagree with the ranking. We don't believe it is right for one country to use its own yardstick to evaluate what another country is doing. Tier 3 is a category for countries which are doing nothing. We have a national committee, we have a national campaign, we have made progress. We have made an earnest effort and we will continue to intensify this. I don't see this as reflecting what we have done. It is up to the United States to decide whether they want to continue engaging with Thailand, working together to ensure further progress. " (The Straits Times, 2014)

Berdasarkan pernyataan Sihasak Phuangketkeow diatas tersebut, ranking atau Tier 3 untuk Thailand menurutnya tidak mencerminkan upaya yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia. Menurut Sihasak, Thailand telah membuat kemajuan dalam memerangi perdagangan manusia. Selain itu, respon lainnya dari negara Thailand didukung dari beberapa pernyataan berikut ini:

2. Pernyataan Resmi Perwakilan Thailand terhadap laporan TIP 2014 dan 2015

Table C.5. Selected RTG Statements in Response to the 2014 and 2015 TIP Reports

RTG's Response to the 2014 TIP Report	RTG's Response to the 2015 TIP Report
<p><i>We are obviously disappointed and respectfully disagree with the State Department's decision. While the latest TIP Report did not recognize our vigorous, government-wide efforts that yielded unprecedented progress and concrete results, Thailand remains committed to combating human trafficking. It is a national priority. Human trafficking is anathema to our nation's core values.</i></p> <p>~ H.E. Mr. Vijavat Issarabhakdi, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the U.S., June 2014¹⁶²</p>	<p><i>Thailand disagrees with the State Department's evaluation in the report, which does not accurately reflect the reality and fails to take into account significant efforts undertaken by the Thai Government on all fronts during the past year.</i></p> <p>~ Royal Thai Embassy, June 2015¹⁶³</p>
<p><i>There is acute awareness throughout Thailand of the need to better identify and help victims of trafficking, and there is strong commitment from the nation's leadership and all ministries working together as a team.</i></p> <p>~ Songsak Saichuea, Director General of Thailand's MFA, June 2014¹⁶⁵</p>	<p><i>In 2013, Thailand made significant advances in prevention and suppression of human trafficking along the same lines as the state department's standards...While the latest TIP Report did not recognize our vigorous, government-wide efforts that yielded unprecedented progress and concrete results, Thailand remains committed to combating human trafficking.</i></p> <p>~ Royal Thai Embassy, June 2015¹⁶⁴</p>
<p><i>Evidence of that commitment and the undeniable progress on combating trafficking in Thailand was submitted this year to the U.S. State Department.</i></p> <p>~ Royal Thai Embassy, June 2014¹⁶⁶</p>	

Keterangan: Tabel diatas berisi pernyataan beberapa perwakilan Kedutaan, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Thailand terhadap keputusan TIP 2014 dan 2015 (Sumber: US Department State, 2014)

Senada dengan Sihasak Phuangketkeow, dalam pernyataan resminya; Duta Besar Thailand untuk Amerika Serikat tahun 2014 menyatakan bahwa Thailand kecewa dan tidak setuju terhadap keputusan dalam laporan tersebut. Sihasak Phuangketkeow juga menambahkan bahwa terserah Amerika Serikat memutuskan ingin terus terlibat dengan Thailand, bekerja sama untuk memastikan kemajuan lebih lanjut atau tidak. Selain itu, Juru bicara pemerintah Thailand - Weerachon Sukondhapatipak dalam pernyataannya, meminta Amerika Serikat untuk bekerjasama lebih dengan Thailand guna mewujudkan kemajuan dalam menangani

praktek perdagangan manusia di Thailand. Pernyataan tersebut disambut baik oleh Amerika Serikat dengan menyatakan bahwa Amerika akan tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah Thailand dalam memerangi bentuk perbudakan dan perdagangan manusia di dunia.

4. Bentuk Kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dan Thailand

Berdasarkan laman resminya, dalam menangani praktek perbudakan dan perdagangan manusia di provinsi Songkhla Thailand, DRL memiliki peran besar sebagai representatif Amerika Serikat. Bersama pemerintah Thailand dan organisasi internasional serta NGOs, AS bekerjasama melalui berbagai program.

a. Kerjasama dalam bidang Bantuan Luar Negeri

Dalam hal ini, untuk menunjukkan komitmennya membantu pemerintah Thailand menangani permasalahan perbudakan dan perdagangan manusia di industri perikanan Thailand (mencakup semua provinsi termasuk Songkhla), DRL menggandeng USAID untuk menjalankan program bantuannya di Thailand.

4.1 USAID (*United States Agency for International Development*)



Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi pendukung kuat dalam peningkatan kerja sama internasional dan pembagian tanggung jawab mengenai migran, pengungsi dan perdagangan manusia di Asia Timur dan Pasifik. Pada KTT Asia Timur / *East Asia Summit (EAS)*, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menyampaikan akan mendukung Deklarasi Pemimpin EAS dalam memperkuat respon terhadap krisis perdagangan manusia. Dalam kesempatan menghadiri KTT Asia Timur tersebut, Obama mengumumkan rencana aksi lima tahun bantuan komprehensif USAID sebanyak \$12 juta di tahun pertama (USAID, 2016). USAID (*United States Agency for International Development*) merupakan

Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika yaitu badan independen yang bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia.

Program bantuan USAID oleh Barrack Obama untuk negara-negara ASEAN termasuk Thailand ini bertujuan mendukung program regional baru untuk memperkuat kolaborasi lintas batas antara sumber, transit, dan negara tujuan perdagangan manusia. Amerika Serikat mendukung ASEAN dalam menerapkan *Convention Against Trafficking in Persons* atau Konvensi Melawan Perdagangan Manusia yang baru. Amerika Serikat turut mendanai IOM (*International Organization for Migration*) untuk melatih pejabat pemerintah dan masyarakat sipil di kawasan *Greater Mekong Sub Region* atau kawasan sub-regional di kawasan Asia Tenggara, salah satunya Thailand - untuk mengidentifikasi dan membantu para migran yang rentan.

Proyek \$1.000.000 pada Februari 2016 ini membantu meningkatkan koordinasi regional, khususnya melalui kerjasama bilateral tentang perlindungan, bantuan, pengembalian, dan reintegrasi untuk korban perdagangan manusia. Selain itu, bertujuan memperkuat sistem hukum domestik untuk menawarkan kompensasi bagi korban perdagangan, membentuk dana kompensasi korban khusus di setiap negara; dan membangun kapasitas jaksa untuk mencari ganti rugi atau kompensasi kriminal (USAID Asia Regional, 2016).

Adapun Thailand, Malaysia, Burma, dan Laos menonjol sebagai prioritas utama dengan masing-masing negara telah menerima \$900.000 (USAID Asia Regional, 2016). Satu program di Thailand memberikan dukungan langsung kepada korban perdagangan manusia di industri perikanan Songkhla, termasuk tempat penampungan, bantuan hukum, dan bantuan perlindungan saksi. Program Malaysia meningkatkan tempat perlindungan dengan melatih organisasi lokal dan pihak berwenang tentang praktik terbaik dan bagaimana menyaring korban. Di Burma, penerima hibah meningkatkan penyelidikan dan penuntutan yang berpusat pada korban melalui pelatihan dan dukungan kepada polisi, hakim, jaksa, dan manajer

kasus. Di Laos, Kantor TIP mendukung pembentukan tempat penampungan bagi korban perdagangan manusia.

Berikut adalah data bantuan Amerika Serikat melalui USAID kepada negara Thailand:

4.2 Data Program Bantuan AS untuk Thailand dalam penanganan *Slavery and Human Trafficking*

1. Proyek Regional I

Country: Regional Project – Nepal, Burma, **Thailand**, Cambodia, Vietnam, Hong Kong, Malaysia
Implementer: Liberty Asia
 Amount: **\$650,000**
 Start Date: 10/1/2014
 Prospective End Date: 9/30/2018
 Duration: 48 months
 Description: Liberty Asia is building a comprehensive victim data collection and management platform that enhances the capacity of anti-trafficking non-governmental organizations in Asia (which may include organizations in Cambodia, Hong Kong, Thailand, Nepal, Vietnam, Burma, and Malaysia) to capture and manage trafficking in persons data in a consistent and high-quality manner. This platform will set a cross cutting example of best practices in human trafficking data collection; aggregate data and research from front-line organizations for quantitative analysis that can inform key stakeholders about human trafficking trends; and facilitate effective prevention, protection and prosecution efforts.

2. Proyek Regional II

Country: Regional Project – Burma, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, **Thailand**, Vietnam
Implementer: International Labor Organization
 Amount: **\$1.5 Million**
 Start Date: 4/1/2017
 Prospective End Date: 3/31/2020
 Duration: 36 months
 Description: The International Labor Organization is building a multi stakeholder initiative to combat human trafficking in the seafood sector in Southeast Asia.

Through this initiative, the ILO will conduct research, institutionalize a convening body to integrate ASEAN regional efforts, and develop regional and national strategies to enhance efforts to combat trafficking in persons in the seafood sector.

Country: Thailand

Implementer: Labor Rights Promotion Network

Amount: **\$600,000**

Start Date: 4/1/2016

Prospective End Date: 3/31/2019

Duration: 36 months

Description: The Labor Rights Promotion Network (LPN) provides direct assistance and support to trafficking victims in the fisheries industry including shelter services, legal aid and witness protection assistance; improves protection strategies, provides training to community leaders, villagers, and fishermen; and coordinates law enforcement on investigations/prosecutions. LPN is raising awareness of their Corporate Social Responsibility (CSR) and Good Labour Practice (GLP) guides in the fishing industry, and on human trafficking in Thailand's fishing industry through media and technology.

Country: Thailand

Implementer: Urban Light

Amount: **\$250,000**

Start Date: 6/1/2016

Prospective End Date: 11/30/2018

Duration: 31 months

Description: Urban Light is expanding services to male victims of trafficking by providing victims services and skills training for individuals transitioning out of sex trafficking; launching a village youth center with empowerment programs; and conducting an outreach campaign to raise awareness of sex trafficking.

Country: Thailand

Implementer: International Justice Mission

Amount: **\$1,000,000**

Start Date: 2/1/2017

Prospective End Date: 1/31/2019

Duration: 24 months

Description: The International Justice Mission improves the capacity of the Thai public justice system to better respond to labor trafficking in the fishing industry.

This is accomplished by providing technical assistance and capacity building to Thai police, prosecutors, and social workers, focusing specifically on victim-centered investigations and prosecutions.

Sumber: U.S Department State (state.gov/)

4.3 Program USAID AS dan *Issara Institute* di Thailand



Dalam melaksanakan programnya, USAID bekerjasama dengan *Issara Institute* di Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia di kapal penangkap ikan dengan menciptakan platform media sosial dan komunikasi yang dirancang untuk menyoroti masalah, mendidik pekerja yang berisiko diperdagangkan, dan memberi korban kemampuan untuk mengkomunikasikan pelanggaran hak asasi dan bantuan akses. Issara Institute merupakan salah satu NGO di Thailand yang menggunakan data terkumpul untuk bekerja dengan perusahaan Thailand dan pengecer global untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia dari rantai pasokan makanan laut.

Berikut adalah data dana bantuan AS kepada Thailand melalui Issara Institute:

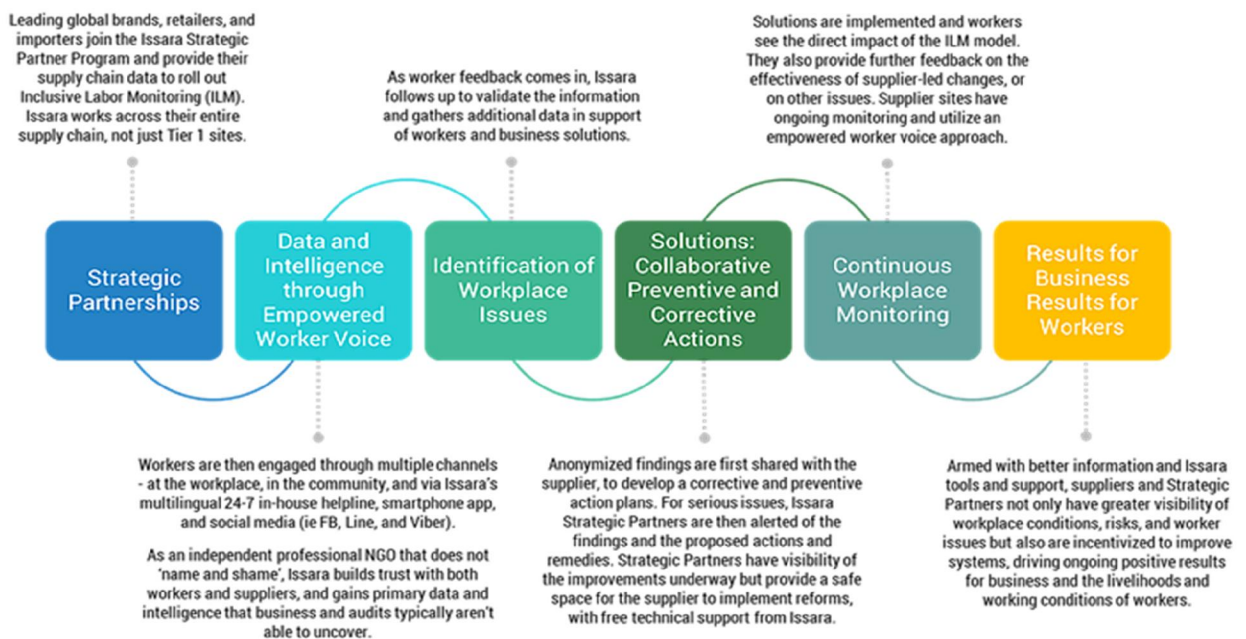
Country: Thailand
Implementer: Issara Institute
 Amount: **\$500,000**
 Start Date: 2/1/2017
 Prospective End Date: 1/31/2019
 Duration: 24 months
 Description: The Issara Institute works to decrease the incidence of trafficking by promoting cleaner supply chains and safer work places. This is accomplished by increasing private-sector partnerships and through awareness-raising efforts. Specifically, the Issara Institute is expanding its anti-trafficking hotline and continuing the development of a Burmese-language smartphone app for migrant laborers in Thailand. In collaboration with private sector companies, the Issara

Institute uses the data from their hotline and app to improve supply chain traceability and risk identification for private sector companies.

Sumber: U.S Department State (state.gov/)

Melalui programnya, Issara mengintegrasikan para pekerja dalam proyek yang dikenal dengan istilah *Fishery Labour Improvement Program (FLIP)* dalam *Issara Strategic Program*.

a. PROGRAM ISSARA STRATEGIC PARTNERS



Program strategis Issara Institute dalam mewujudkan misinya (sumber: issarainstitute.org)

Hasilnya, berdasarkan keterangan diatas, USAID dan Issara Institute melalui program ini fokus dalam membahas peningkatan tenaga kerja di sektor perikanan di Thailand dengan empat inisiatif utama, yaitu:

1. *Issara Remediation Initiative:*

Issara menjalin kerjasama dengan Pemilik Kapal dan mendidik para tenaga kerja tentang hak-hak buruh, kemudian mengidentifikasi dan meremediasikan risiko tenaga kerja

2. *Ethical Recruitment Program:*

Bekerjasama dengan pemerintah dan agen perekrutan progresif terkait pemahaman perekrutan tenaga kerja

3. *Multi-stakeholder Debt Relief Fund:*

Bekerja dengan mitra strategis Issara untuk mendorong pemilik kapal dalam membatalkan utang dari calon tenaga kerja dan menyerap biaya perekrutan mereka

4. *Worker Voice at Sea:*

Mengintegrasikan teknologi paling mutakhir dalam pelacakan kapal serta pelaporan penelusuran praktek-praktek perbudakan dan perdagangan manusia di laut Thailand dengan meningkatkan suara pekerja Issara.

Selain menjalin kerja sama dengan USAID, *Issara Institute* Thailand juga berkolaborasi dengan FishWise, Walmart Foundation, Aqua Star, CP, SeaFarms, Sainsbury's, World Wise Foods, Humanity United, Lyons Seafood, dan Nestle.

4.2 Program *U.S Government Fund Anti Trafficking in Persons* untuk Thailand

Kerjasama Amerika dan Thailand pada tahun 2011 telah terjalin melalui program *U.S Government-Fund Anti Trafficking in Persons*. Program ini menyediakan bantuan dana bagi negara-negara dalam memerangi perdagangan manusia. Tahun 2011-2012, program ini ditujukan khusus bagi negara India, Mexico, Filipina, Nigeria, Eropa Tenggara (SEE), Indonesia, Afrika Selatan, Asia - serta negara yang bergabung dalam *Greater Mekong Sub-Region*, termasuk Thailand sebagai anggotanya sebesar \$1,000,000 (SPOGC, 2011: 17). Misi program bantuan dana oleh Amerika Serikat tersebut juga bertujuan untuk mengoordinasikan kebijakan antar-lembaga terkait pelaksanaan undang-undang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TIP) dan implementasi TPVA.

Terdapat lima bidang yang menjadi fokus bantuan program tersebut meliputi:

1. Area 1 - *Policy and Cooperation*
2. Area 2 - *Legal Frameworks, Law Enforcement and Justice*
3. Area 3 - *Protection, Recovery, and Reintegration*
4. Area 4 - *Preventive Measures and Vulnerability Reduction*

5. Area 5 - *Monitoring, Evaluation, and Anti-Human Trafficking Data System* (UNIAP, 2011: 5)

Adapun hasilnya, Thailand mengeluarkan *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* berisi rencana aksi Thailand untuk menangani perdagangan manusia. Mengadakan kampanye *anti-human trafficking*, meratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada 16 November 2013 (OATPC, 2013: 11), mengembangkan layanan konseling bagi migran, mengembangkan *One Stop Crisis Center* (OSCC) dan menjalin kerjasama dengan *private sectors* dibidang industri perikanan guna mengembangkan sistem database dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia di Thailand (OATPC, 2013: 61).

Adapun implementasi dari *Thailand's Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013* adalah Biro Imigrasi meningkatkan identifikasi korban perdagangan manusia dengan memerintahkan semua kantor imigrasi provinsi untuk menggunakan formulir standar dalam mewawancarai migran. Dalam hal ini, kantor imigrasi provinsi Songkla bertugas memegang migran ilegal Myanmar yang memasuki Thailand melalui Mae Sod (provinsi Tak). Hasil dari PVIP tersebut dari Januari hingga Desember 2012, total 397.167 (TIP, 2012: 12) individu diwawancarai. 20 kasus melibatkan 57 orang yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.

Pada 22 – 23 November 2012, 56.423 perwira polisi Thailand secara nasional berpartisipasi dalam workshop tentang *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551* (2008) dan PVIP. Workshop ini diselenggarakan oleh kepala unit yang berkaitan dengan TIP di bawah Biro Polisi Metropolitan, Sektor Polisi Provinsi 1-9, Pusat Administrasi Perbatasan Selatan Thailand, dan Kantor Imigrasi. Di antara petugas ini, 37.644 berasal dari unit Pencegahan, 9.780 dari unit *Inquiry*, 8.996 dari unit Investigasi, dan 3 dari unit lain.

b. Kerjasama dalam bidang penanganan Korupsi, Perdagangan manusia dan IUU Fishing di Songkhla



U.S. Under Secretary of State for Civilian Security, Democracy and Human Rights Sarah Sewall discusses links between corruption, human trafficking and illegal fishing with port security officials in Thailand.
U.S. Department of State

Kerjasama yang dimaksud disini adalah AS memberikan rekomendasi dan masukan kebijakan kepada pemerintah Thailand. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari setiap laporan tahunan AS untuk Thailand di *TIP report*. Sebagai wujud komitmennya, AS mengirim representatif Sarah Sewal tahun 2014 bekerjasama dengan DRL untuk terjun langsung membahas permasalahan korupsi, perdagangan manusia dan IUU Fishing di Thailand dengan pemerintah dan aparat kepolisian. Adapun rekomendasi yang dimaksud, AS meminta Thailand untuk segera menyelidiki semua laporan keterlibatan pemerintah dalam kasus perdagangan manusia di semua provinsi termasuk Songkhla serta mengadili dan menghukum pelaku. Disamping mengembangkan dan menerapkan prosedur identifikasi korban dan memberikan perlindungan kepada migran asing sebagai hak semua manusia.

AS juga meminta Thailand untuk mengakui peran berharga NGO atau LSM dalam mengungkap praktek perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand. Membentuk divisi pengadilan khusus, mengambil langkah-langkah lain untuk secara konsisten meningkatkan

ketersediaan layanan untuk melindungi migran asing serta korban lainnya. Sebagai hasilnya dari pertemuan tersebut, setahun setelahnya pengadilan dan penuntutan terhadap Letnan Jenderal Manas Kongpan dilaksanakan bersama tersangka lainnya. Selain itu, menurut laman resminya, AS meminta Thailand untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna mempercepat upaya penanganan praktek perbudakan dan perdagangan manusia di semua provinsi Thailand, termasuk kawasan Thailand Selatan yaitu provinsi Songkhla yang juga masuk dalam list provinsi rawan perdagangan manusia.

Adapun langkah-langkah upaya yang dimaksud AS untuk pemerintah Thailand tersebut mencakup:

- (1) *Registration of vessels* – agar Departemen Perikanan dan Departemen Kelautan Thailand mempercepat proses pendaftaran kapal penangkap ikan.
- (2) *Intensified inspections* – agar badan-badan yang relevan untuk melakukan inspeksi intensif terhadap kapal-kapal penangkap ikan dan pekerja yang bekerja di kapal - dengan 77 kapal yang ditunjuk sebagai kapal patroli.
- (3) *Establishment of Virtual Memory System / VMS Operation Centers* – membentuk Pusat Operasi sistem berbasis komputer untuk memfasilitasi pemantauan dan pelacakan guna mengumpulkan informasi terkait lokasi dan waktu di laut untuk tujuan pemeriksaan.
- (4) *Subordinate legislation on VMS installation* – agar Departemen Perikanan dan Departemen Kelautan mengeluarkan undang-undang subordinasi untuk mewajibkan kapal penangkap ikan untuk memasang VMS dan menghubungkan sinyal VMS ke Pusat Operasi VMS.
- (5) *Establishment of Port in-Port Out Control Centers* – membentuk pusat yang bertugas mengontrol pelabuhan diluar inspeksi.
- (6) *Patrol and Inspection at sea* – melakukan inspeksi patroli di perairan Thailand untuk melakukan operasi penyelamatan korban yang diperdagangkan.
- (7) *Registration of migrant fishery workers* – Mempercepat proses pendaftaran pekerja migran di bidang perikanan. Pemilik kapal dan kapten kapal harus secara ketat mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk melindungi tenaga kerja dalam Industri Perikanan Laut tahun 2014 dan memastikan bahwa pekerja migran diberi tingkat perlindungan yang sama seperti pekerja Thailand.

4.2 Implementasi Projects

Dari langkah rekomendasi yang disarankan oleh AS diatas, upaya pembentukan *Port in-Port Out Control Centers* atau kantor pusat yang bertugas mengontrol aktifitas di setiap pelabuhan dan industri perikanan secara resmi diimplementasikan oleh Thailand pada tahun 2016. Pembentukan PIPO dinilai sebagai jalan keluar dalam mewujudkan keenam upaya lainnya diatas.



Kunjungan Peter Haymond ke Provinsi Songkhla (*sumber: th.usembassy.gov/*)

Dalam kunjungannya ke provinsi Songkhla pada 28 April 2017, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar AS di Bangkok - Peter Haymond mengamati pemeriksaan kapal di *Forward Inspection Point* provinsi Songkhla, melakukan interaksi dengan petugas pelabuhan dan mengunjungi penampungan korban perdagangan manusia. Berdasarkan laman resmi Kedutaan Besar AS di Bangkok, kunjungan ini merupakan bentuk kerjasama berkelanjutan antara AS dan Thailand dalam mencapai pemahaman yang lebih besar tentang perbudakan dan perdagangan manusia, serta wujud upaya kedua negara dalam mengatasi masalah tersebut. Kedutaan Besar AS, DRL dan *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) bekerjasama dengan pemerintah Thailand mengembangkan

sistem pengumpulan data strategis yang dirancang untuk menginformasikan, memantau serta meningkatkan keefektifan penanganan perdagangan manusia yang dikenal dengan sistem SIREN (*Strategic Information Response Network*).

Berdasarkan Thailand's Country Report 2017, berikut adalah beberapa hasil implementasi program kedua negara dalam penanganan praktek perbudakan dan perdagangan manusia mencakup implementasi program di provinsi Songkhla:

- 40 petugas PIPO dilatih mengenai teknik wawancara selama proses identifikasi imigran korban perdagangan manusia
- 306 pengawas ketenagakerjaan Thailand dilatih mengenai keterampilan dan teknik pengawasan imigran di sektor laut; 360 pengawas ketenagakerjaan dan pejabat dari dinas pemerintah terkait dilatih untuk memerangi perdagangan manusia di berbagai provinsi yang dinilai rawan termasuk Songkhla, memerangi pekerja anak dan mencegah kerja paksa di laut; serta 510 pengawas ketenagakerjaan dan pejabat dari dinas terkait dilatih tentang inspeksi berbasis intelijen
- Pelatihan untuk penerjemah: 41 penerjemah dilatih untuk menjadi penerjemah yang berkualitas dengan dibekali ilmu terkait perlindungan korban perdagangan manusia dalam program identifikasi korban perdagangan manusia yang efektif yang dikenal dengan PVIP (*Preliminary Victim Identification Process*). Dari 41 penerjemah, 22 orang adalah penerjemah bahasa Myanmar dan 19 adalah penerjemah bahasa Kamboja, tujuh dari antara penerjemah tersebut ditempatkan di Songkhla
- Pelatihan Pekerja Sosial: 229 pekerja sosial yang bekerja di tempat penampungan MSDHS dilatih tentang perlindungan khusus terhadap para buruh yang menjadi korban perdagangan manusia di laut
- Kampanye '*Anti - Human Trafficking*' oleh NGOs di setiap provinsi yang memiliki industri perikanan dan merupakan kawasan rawan praktek perbudakan dan perdagangan manusia, mencakup Thailand Selatan dan Thailand Utara.

- Pengembangan sistem 'Pink Card' untuk imigran asal Myanmar, Laos dan Kamboja. *Pink Card* merupakan kartu pengenalan bagi para imigran yang bekerja di industri perikanan, khususnya mereka yang terdata masuk Thailand tanpa dokumen sebelumnya. Dalam hal ini Thailand menjamin perlindungan terhadap mereka.
- Pendistribusian surat kabar *Migrant Times Newsletter* yang didanai oleh bank FED's Amerika Serikat pada tahun 2015. Setiap bulannya 5000 buah brosur dan surat kabar berisi kampanye 'Safe Migrants' disebar ke sekolah dan perpustakaan dan semua provinsi di Thailand khususnya Songkhla. Selain itu FED's bekerjasama dengan Pemerintah Thailand, NGOs dan IOM membuat animasi seputar perdagangan manusia dan imigran dengan memanfaatkan sosial media seperti Facebook, YouTube dan Twitter dan membayar biaya iklan untuk setiap penayangan video animasi (*IOM Bangkok, 2015*).
- Pembuatan Aplikasi: Amerika Serikat melalui FED's bekerjasama dengan pemerintah Thailand dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi yang dapat di unduh di *smartphone* berisi informasi tentang panduan seputar penanganan perdagangan manusia, informasi mengenai hak-hak buruh berupa upah minimum, jam kerja, kondisi dan keselamatan kerja. Aplikasi ini dirilis pada August 2017 di Thailand dan terhitung pada 10 November 2017, aplikasi ini sudah di unduh sebanyak 2,849 kali (*US Department of State, 2017*).

Selain data kerjasama dengan *Urban Light* dan *Labor Rights Promotion Network* diatas, AS dan Thailand dalam kerjasamanya juga menggandeng beberapa NGOs lain seperti *Zoe International* dan *New Life Center* di Thailand.

5.5.2 Cooperation with the U.S. Department of State



support USD 1.4 million in 2016 to NGOs such as ZOE international, New Life center, Urban Light and Labor Rights Promotion Network Foundation

Workshops and projects funded by



- Anti-Human Trafficking Workshop 2016
- "Next Level" Project
- CTIP Projects

Diagram Kerjasama AS dan Thailand (sumber: Thailand's Country Report, 2016)

Pada tahun 2016 DRL dibawah naungan *U.S Department of State* mendanai 1.4 juta dolar untuk menyelenggarakan sebuah workshop dan proyek di Thailand. Topik lokakarya tersebut adalah *Anti-Human Trafficking Workshop 2016*, berikut dengan dua proyek yaitu *Next Level* dan *CTIP Projects*. Berdasarkan laporannya, Thailand menyebutkan bahwa kerjasama ini adalah hasil konsultasi rutin antara pejabat tinggi dari Kantor Departemen Luar Negeri AS dan Kementerian Luar Negeri Thailand. Kedutaan Besar dan Kementerian Luar Negeri AS di Bangkok setuju untuk menjalin kerjasama tersebut diatas guna meningkatkan dan mengembangkan minat bersama dalam bekerja memerangi perdagangan manusia di Thailand.

1. *Anti-Human Trafficking Workshop 2016*

Anti-Human Trafficking Workshop 2016 yang telah didanai dan didukung oleh pihak AS bertujuan untuk menggambarkan kondisi perdagangan manusia di Thailand, memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia serta mencari

solusi bersama dalam upaya pencegahannya. Workshop ini dihadiri oleh 50 representatif meliputi pemuda, akademisi, perwakilan polisi dari beberapa provinsi rawan perdagangan manusia yaitu Ranong, Tak, Songkhla, Nakorn Srithammarat, Samut Sakhon, Nong Kai, Chonburi dan Sra Kaew (*Thailand's Country Report, 2016*). Sementara

2. *Next Level Project dan CTIP Projects*

Proyek *Next Level* menyoroti tema perlawanan terhadap perdagangan manusia dengan menjangkau industri perikanan yang rentan di Thailand Utara (Chiang Mai, Tak, Chiang Rai, Phetchabun) dan kawasan Thailand Selatan (Trang, Ranong, Pattani, Songkhla, Surat Tani). Proyek ini berkolaborasi dengan Kedutaan Besar di AS, Universitas Mae Fah Luang dan Universitas Rajabhat Suratthani. Adapun hasilnya, USAID bersama dengan LSM lokal melalui program CTIP (Combating Trafficking in Persons) mengembangkan *mobile app* atau aplikasi android dengan pilihan bahasa untuk memfasilitasi migran Myanmar, Kamboja maupun Laos di perindustrian ikan kawasan Thailand Utara dan Thailand Selatan, berupa informasi tenaga kerja terpercaya, serta informasi persyaratan imigrasi.